

## Jateng Sabet Tiga Penghargaan Sektor Pangan Bapanas

SEMARANG (KR) - Intensif mendorong terciptanya penganekaragaman konsumsi dan keamanan

pangan di Jawa Tengah, Pemprov Jawa Tengah meraih tiga penghargaan dari Badan Pangan Nasio-

nal (Bapanas), yaitu terbaik kategori Pelaksana Program Penganekaragaman Konsumsi dan Ke-

amanan Pangan, terbaik kategori Pelaksana Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan, dan terbaik ketiga kategori Skor Pola Pangan Harapan.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jawa Tengah Dyah Lukisari kepada wartawan di Semarang Sabtu (15/2). Ketiga penghargaan diserahkan oleh Deputy Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto, Kepala Dishanpan Jawa Tengah Dyah Lukisari.

Menurut Dyah Lukisari, penghargaan itu menjadi bukti komitmen dan dedikasi pemprov dalam mengimplementasikan program yang fokus pada

peningkatan keberagaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Kegiatan penganekaragaman mendapatkan apresiasi karena Pemprov Jawa Tengah intens dalam pembinaan produsen, hingga pengenalan berbagai produk pangan lokal kepada konsumen, terutama generasi Z.

Pada 2023 Pemprov Jateng sukses membina 18 kelompok UMKM pangan lokal terutama produsen

pangan lokal berbasis singkong dengan difasilitasi alat produksi. Selain itu, Dishanpan juga gencar mengenalkan mi mocaf kepada generasi Z, melalui program makan mi mocaf gratis di 49 cafe yang berada di empat kota / kabupaten di Jateng.

Dyah menilai pengenalan penganekaragaman pangan lokal cukup berhasil, dengan diberikannya penghargaan capaian pola pangan harapan. Pola Pa-

ngan Harapan merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan, yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi seimbang. Saat ini skor PPH Jawa Tengah 94,2, lebih tinggi dari nasional 94,1.

(Bdi)-d



KR-Budiono

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng Dyah Lukisari saat menerima penghargaan.

## Mimbar Legislatif

### DPRD Jateng Siapkan Perda Pendidikan Pancasila

KETUA Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Jateng Sukirno mengatakan, lembaga yang dipimpinnya melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terkait dengan rencana DPRD Jawa Tengah yang akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.



Sukirno

KR-Budiono

kegiatan masyarakat. Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang sudah mempunyai dan menerapkan Perda Pancasila. DPRD Jawa Tengah berencana untuk mengadopsi apa saja yang bisa dijadikan bahan untuk merumuskan dan membuat produk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Jateng.

Sukirno mengatakan hal ini kepada wartawan di sela-sela kunjungannya ke Yogyakarta pekan lalu. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi soal pelaksanaan Perda tentang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang sudah dilaksanakan di Yogyakarta.

Pansus VIII DPRD Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta khusus untuk mempelajari Perda tersebut sekaligus untuk mendapatkan masukan. Berdasarkan informasi yang diterima Pansus DPRD Jawa Tengah, Kota Yogyakarta sudah menerapkan dan melaksanakan Perda pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan sudah ada tahapan implemetasinya di

Pansus VIII DPRD Jawa Tengah menilai aturan yang ada di Perda pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dimiliki Kota Yogyakarta lebih lengkap. Dengan demikian Pansus tahu apa yang harus diadopsi untuk dimasukkan dalam merumuskan Perda Jawa Tengah nanti. Pembuatan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini oleh DPRD Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Jateng. (\*)-d

(Disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Jateng Sukirno kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)

## FPIH Unimus Lakukan Pengabdian Masyarakat di Malaysia

SEMARANG (KR) - Sanggar Belajar (SB) Kubu Gajah merupakan salah satu dari beberapa sanggar belajar untuk anak-anak Indonesia yang berada di kawasan Kuala Lumpur dan sekitarnya. Sekolah tersebut adalah sekolah non-formal yang menyediakan pendidikan Kejar Paket untuk anak-anak para pekerja migran Indonesia (PMI), yang terkendala dokumen dan tidak dapat mengenyam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah Malaysia.

Sanggar-sanggar seperti Kubu Gajah berada di bawah naungan dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) dan mendapat perlindungan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) Kedutaan Besar Republik Indonesia

di Malaysia. Memahami situasi dan kondisi ini, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora (FIPH) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) berkontribusi melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Sanggar Belajar Kubu Gajah dalam bentuk mengajarkan bercerita (Storytelling) dengan Pop Up Book sekaligus membuat Pop Up Book secara sederhana kepada anak-anak, serta storybook reading dan telling dwibahasa (Bahasa Indonesia dan Inggris).

Tim pengabdian program ini antara lain Dr. Dodi Mulyadi (Pendidikan Bahasa Inggris Unimus), Heri Dwi Santoso (Sastra Inggris Unimus), Eko Andy Purnomo (Pendidikan Matematika Unimus), dan An-

dari Puji Astuti (Pendidikan Kimia Unimus). Program pengabdian di SB Kubu Gajah ini diawali dengan penandatanganan dokumen MoA dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) sebagai pihak yang menaungi Sanggar-Sanggar Belajar dan dokumen Implementation Agreement (IA).

Pada kunjungan ke Malaysia tersebut, FIPH Unimus juga melakukan Penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia, di Kantor Ranting Istimewa Muhammadiyah dan 'Aisyiyah Kampung Baru, Kuala Lumpur. (Sgi)-d



KR-Sugeng Irianto

Beberapa dosen Unimus bersama peserta didik sanggar.

## Masyarakat

bervariasi mulai Rp 72.000, Rp 75.000, bahkan ada yang menjual Rp 80.000 per 5 kilogram. Harga tersebut tidak sesuai dengan ketentuan HET yang ditetapkan Pemerintah yakni Rp 69.500 perkilogram.

Zulkifli menuturkan, peningkatan harga beras premium tidak hanya disebabkan faktor ketersediaan, tetapi juga oleh penundaan panen akibat fenomena El Nino. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan beras di pasaran, mengakibatkan tingginya harga jual.

"Memang suplai beras premium tidak sebanyak dulu karena kita belum panen, panennya mundur, karena fenomena El Nino, supplainya kurang harganya naik," ucap Mendag.

Menurutnya, Program Beras SPHP dari Perum Bulog sebagai solusi alternatif dalam menanggulangi kenaikan harga beras premium yang tinggi di sejumlah ritel modern maupun di pasar tradisional. "Sekarang ada beras Bulog yaitu SPHP, beras SPHP sekarang menjadi alternatif, karena semua berharap pada SPHP," ujarnya.

Dikemukakan, beras SPHP dari Bulog memberikan kepastian harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Program tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk menjaga ketersediaan stok beras di pasaran. "Stok beras SPHP cukup, kita ada 1,3 juta ton di Bulog, jadi aman, nggak ada masalah," tuturnya seraya berharap adanya peningkatan ketersediaan stok beras dari Bulog, terutama SPHP agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan lebih baik.

Pemerintah terus memantau perkembangan harga beras di pasaran dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai kondisi dan kebutuhan pasar. Namun, untuk saat ini, belum ada keputusan untuk merevisi HET beras. Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutkan, Pemerintah tidak memilih opsi untuk menaikkan HET beras meskipun harga gabah meningkat. "Karena jika Pemerintah menaikkan HET dikhawatirkan justru akan mendorong kenaikan harga beras lebih tinggi kepada konsumen,"

kata Deputy III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono.

Menurutnya, kalau menaikkan HET akan mendorong harga lebih tinggi lagi.

Untuk mengatasi kelangkaan stok beras di ritel, Edy mengatakan, Pemerintah menugaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk menyalurkan beras premium Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di ritel modern dengan harga sesuai HET.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebutkan, meskipun saat ini harga beras di sejumlah daerah mengalami kenaikan, namun tidak ada kebijakan baru soal perubahan atau penyesuaian HET komoditas pokok tersebut. "Tegas, HET tidak disesuaikan. HET sudah diputuskan dengan Presiden (Joko Widodo), tidak disesuaikan, jadi tetap," kata Bayu.

Dikatakan, meski harga beras premium di sejumlah wilayah mencapai Rp 15.000-Rp 16.000 perkilogram, namun Pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian HET. (Ant/San)-d

## 71 Petugas

Sebelumnya, Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024. "Iya, disiapkan santunan," katanya.

Dijelaskan, santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara tek-

nis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023. Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp 36 juta dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta," tambah Hasyim. (Ati)-d

## Jokowi

berpindah koalisi. "Saat ini masih cukup dini untuk menyatakan pindah koalisi, apalagi penetapan hasil pemilu belum dilakukan, dan pembentukan kabinet juga belum dilakukan," katanya.

Caroline menilai pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh untuk memastikan hasil penghitungan suara dapat diterima oleh semua pihak yang berkontestasi.

"Oleh karena itu, upaya-upaya untuk pendekatan akan mulai dilakukan agar hasil pemilu dapat diterima, dan potensi peno-

lakan, bahkan gugatan dapat diminimalkan," sebutnya.

Presiden Jokowi sendiri menyebut pertemuannya Surya Paloh untuk menjadi 'jembatan' atau menjembatani sesuatu. "Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final, kami sampaikan. Akan tetapi, itu setelahnya saya hanya menjadi 'jembatan', yang paling penting 'kan nanti partai-partailah," ujarnya usai peresmian RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Soedirman dan 20 rumah sakit TNI di Jakarta, Senin (19/2). (Ant/Has)-d

## Tetap

la menyebutkan, ada berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan AI sebagai pengelola untuk perusahaan media melakukan diversifikasi saluran baik melalui layanan instant messaging dan video. "Ketiga, perusahaan media bisa melakukan upskilling (meningkatkan keahlian) karyawan untuk memiliki kemampuan yang diperlukan menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi," ujarnya.

Saran keempat yang diutarakan Budi Arie, agar perusahaan media bisa menghadirkan konten-konten baru mengikuti perkembangan digitalisasi seperti membuat podcast dan sejenisnya. Hal itu dinilai, dapat memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses karya jurnalistik yang bisa dipercaya informasinya.

Pihaknya optimistis apabila perusahaan media melakukan keempat hal tersebut dengan berkesinambungan, hadirnya AI sebagai bagian dari disrupsi digital bukan suatu penghalang tapi menjadi peluang untuk media terus

bertumbuh. Menkominfo menyebutkan, pada data yang dirilis Asosiasi Surat Kabar dan Penerbitan Berita Dunia (WAN-IFRA), pendapatan industri pers global bernilai 112,4 miliar dolar AS pada 2021-2022 dan meningkat hingga 13,55 persen menjadi 130,02 miliar AS pada laporan 2022-2023. Peningkatan tersebut menunjukkan media tetap bertumbuh.

"Hal ini saya harapkan dapat membangkitkan napas optimisme bagi rekan-rekan media semua apalagi tersedia banyak langkah bagi perusahaan-perusahaan pers menghadapi disrupsi teknologi," tandas Budi. (Obi)-d

## Massa

Patung Kuda. Pengendara harus memperlambat laju kendaraannya. Sesekali suara klakson juga terdengar dari beberapa kendaraan.

Koordinator aksi Noviana Kurniati menjelaskan, dopo kali ini menuntut

agar Bawaslu dapat tetap bersikap netral dalam menangani segala bentuk laporan kecurangan dalam Pemilu 2024. "Kami meminta Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pi-

lih, bersikap netral. Dia harus tahu fungsi dan tupoksinya. Ini adalah masukan yang positif bagi Bawaslu untuk ke depannya agar bisa lebih baik," katanya kepada wartawan. (Ant/Has)-d

## Pemilihan

tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

Penyebab lainnya, apabila ditemukan petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan pemilihan. Sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, pemilihan yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. Serta jika terdapat pemilihan yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

Secara jumlah, PSU dan PSL pada Pemilu 2024 kali ini terhitung lebih sedikit dibandingkan Pemilu 2019. Pada Pemilu 2019, terdapat 27 PSU dan 24 PSL merata di seluruh kabupaten/kota di DIY. Khusus PSU, seluruh penyebabnya hampir seragam yakni memberi kesempatan kepada pemilih luar DIY untuk mencoblos di TPS tanpa menggunakan surat pindah memilih.

Hasil riset penulis di tahun 2019, sekiranya terdapat empat dampak ter-

jadinya PSU. *Pertama*, penyiapan anggaran ekstra. Setidaknya dibutuhkan biaya kembali untuk honor petugas, baik KPPS maupun petugas keterliban, biaya pembuatan TPS dan konsumsi. Makin banyak PSU, makin membengkak biaya tambahan yang harus disiapkan. *Kedua*, penyiapan logistik menjadi secara cepat. KPU kabupaten/kota harus mengkonsolidasi jajaran di bawahnya, baik PPK, PPS dan KPPS untuk menyiapkan logistik baik kotak suara, bilik, surat suara khusus dan perlengkapan lainnya persis seperti pemungutan suara sebelumnya. Hal ini karena limit waktu bagi KPU untuk menyelenggarakan PSU dibatasi hanya 10 hari sejak pemungutan suara.

*Ketiga*, anjloknya partisipasi pemilih. Dari sejumlah TPS yang mengadakan PSU, tercatat sebagian besar mengalami penurunan tingkat kehadiran. Hal ini wajar, mengingat beberapa PSU dilaksanakan tidak pada hari libur atau waktu senggang bagi masyarakat. *Keempat*, meningkatkan suhu politik di tingkat lokal, dan menimbulkan ketegangan. Ketegangan

yang terjadi saat itu bukan hanya antarpengguna. Namun juga antarpengelola kualitas rekomendasi dan waktu datangnya rekomendasi yang bergelombang.

Pengalaman berharga terjadinya PSU pada tahun 2019 semestinya menjadi guru yang baik untuk persiapan PSU di Pemilu 2024 ini. *Pertama*, KPU harus menentukan waktu yang tepat untuk menggelar PSU. Hari libur kerja, Sabtu atau Minggu, bisa dipilih agar tidak ada halangan bagi warga yang bekerja untuk tidak hadir ke TPS. *Kedua*, PSU dapat pula menjadi ajang bagi peserta pemilu untuk mendongkrak suara lewat bujukan dengan politik uang. Terlebih ketika selisih suara sangat tipis dan menentukan perolehan kursi.

Selain terus mengimbau masyarakat untuk menjauhi politik uang, Bawaslu juga memiliki tugas untuk melakukan pencegahan politik uang agar pemilu tetap berjalan secara bermartabat. (Penulis adalah Ketua KPU DIY Periode 2013-2023)-d



## Prakiraan Cuaca

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☀️	☁️	☁️	☁️	22-30	65-95
Slleman	☀️	☁️	☁️	☁️	22-29	65-95
Wates	☀️	☁️	☁️	☁️	22-29	65-95
Wonosari	☀️	☁️	☁️	☁️	22-30	65-95
Yogyakarta	☀️	☁️	☁️	☁️	22-30	65-95